

ANALISIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE INDEPENDENT CURRICULUM POLICY IN ISLAMIC SCHOOLS: CHALLENGES AND STRATEGIES FOR STRENGTHENING ISLAMIC VALUES

Ahsyaf Burhan,^{1*}

UINSSC Cirenon, Indonesia¹

Email: ahsyafsip@gmail.com

DOI:xxxxxxx

Submission Track:

Received: 06-11-2025

Final Revision: 27-02-2026

Available Online: 28-02-2026

Copyright © 2026 Authors



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Abstract

The Merdeka Curriculum is a national education policy emphasizing flexibility, differentiated learning, and character strengthening. This article analyzes the implementation of the Merdeka Curriculum policy in Islamic schools, focusing on the adaptation of Islamic values and contextual challenges faced by teachers and educational institutions. Using a qualitative descriptive approach based on literature review and policy analysis, the study finds that implementing the Merdeka Curriculum in Islamic schools faces constraints related to teacher readiness, understanding of independent learning principles, and the integration between the Pancasila Student Profile and the Rahmatan lil 'Alamin Student Profile. This study recommends more inclusive policy strategies through continuous teacher training, spiritual value reinforcement, and inter-institutional collaboration to ensure effective implementation without neglecting Islamic identity.

Keywords: *Merdeka Curriculum, Islamic School, Education Policy, Implementation Analysis.*

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH ISLAM: TANTANGAN DAN STRATEGI PENGUATAN NILAI KEISLAMAN

Abstrak

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pendidikan nasional yang menekankan fleksibilitas, pembelajaran berdiferensiasi, dan penguatan karakter peserta didik. Artikel ini menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah Islam, dengan fokus pada adaptasi nilai-nilai keislaman serta tantangan kontekstual yang dihadapi guru dan lembaga pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis kajian literatur dan analisis kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah Islam masih menghadapi kendala pada aspek kesiapan sumber daya manusia, pemahaman guru terhadap esensi merdeka belajar, serta integrasi antara Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin. Artikel ini merekomendasikan strategi kebijakan yang lebih inklusif melalui pelatihan guru yang berkelanjutan, penguatan nilai spiritual, dan kolaborasi lintas lembaga agar kebijakan Kurikulum Merdeka dapat diterapkan tanpa mengabaikan identitas keislaman.

Kata kunci: *Al-Qur'an, Digitalisasi, Teknologi, Kajian Islam Kontemporer*

Pendahuluan

Perubahan arah kebijakan pendidikan di Indonesia pasca-pandemi COVID-19 ditandai dengan lahirnya Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini menjadi upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Prinsip utama dari kebijakan ini adalah kebebasan dalam merancang pembelajaran sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi siswa.

Namun, penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah Islam menimbulkan tantangan tersendiri. Sekolah Islam memiliki mandat ganda: selain memenuhi standar kebijakan nasional, mereka juga harus menjaga integritas nilai-nilai keislaman dalam proses pembelajaran. Dalam konteks ini, terjadi dialektika antara fleksibilitas kurikulum nasional dan kekhasan kurikulum keagamaan.

Menurut Wajdi (2022), keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada rancangan kebijakan makro, tetapi juga pada kemampuan lembaga pendidikan untuk menyesuaikan implementasinya dengan konteks nilai, budaya, dan visi kelembagaan (Wajdi, 2022). Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan Kurikulum Merdeka diimplementasikan di sekolah Islam, apa tantangan yang dihadapi, dan bagaimana strategi yang dapat dilakukan agar kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip pendidikan Islam.

Dalam konteks perubahan paradigma pendidikan global, kebijakan Kurikulum Merdeka dapat dipandang sebagai respon terhadap kebutuhan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Namun, penerapannya di sekolah Islam menuntut reinterpretasi terhadap konsep kebebasan belajar agar tidak bertentangan dengan prinsip tarbiyah Islamiyah. Hal ini berarti bahwa kebebasan yang dimaksud tidak bersifat liberal tanpa batas, tetapi diarahkan untuk menumbuhkan kemandirian berpikir yang tetap berpijak pada nilai-nilai syariah dan akhlak. Dengan demikian, konsep “merdeka belajar” perlu dimaknai secara kontekstual sebagai “kemerdekaan yang bertanggung jawab,” yakni kebebasan yang tetap terikat pada tujuan pendidikan Islam: membentuk insan kamil yang seimbang antara aspek intelektual, spiritual, dan moral.

Lebih jauh, dialektika antara kebijakan pendidikan nasional dan misi pendidikan Islam menuntut pendekatan kebijakan yang bersifat integratif dan dialogis. Sekolah Islam perlu berperan aktif dalam proses adaptasi kebijakan, bukan sekadar sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai subjek yang berkontribusi terhadap pengayaan makna Kurikulum Merdeka. Upaya ini dapat dilakukan melalui inovasi kurikulum yang menggabungkan nilai-nilai Islam dalam proyek pembelajaran kontekstual, serta melalui pengembangan kapasitas guru agar mampu memadukan pendekatan pedagogis modern dengan prinsip pendidikan spiritual. Dengan cara ini, Kurikulum Merdeka tidak hanya menjadi instrumen reformasi teknis, tetapi juga wahana transformasi nilai dalam pendidikan Islam di Indonesia.

Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian literatur. Sumber data diperoleh dari: (1) dokumen resmi pemerintah seperti Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka (Kemendikbudristek, 2022), (2) artikel akademik terkait pendidikan Islam dan kebijakan publik, dan (3) karya ilmiah Dr. Farid Wajdi yang relevan dengan kebijakan pendidikan Islam dan manajemen pendidikan. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan).

Hasil & Pembahasan

Kurikulum Merdeka menekankan tiga prinsip utama: (1) pembelajaran berdiferensiasi, (2) proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan (3) fleksibilitas guru dalam mengembangkan perangkat ajar. Tujuannya adalah menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan sesuai kebutuhan peserta didik (Kemendikbudristek, 2022).

Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak sekadar transfer ilmu, tetapi pembentukan karakter dan spiritualitas (ta'dib). Sekolah Islam berfungsi sebagai lembaga yang menanamkan keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Karena itu, kebijakan pendidikan harus selalu mempertimbangkan dimensi moral dan religius.

Wajdi (2021) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam harus dianalisis melalui pendekatan value-based policy analysis, yakni model analisis kebijakan yang berorientasi pada nilai keagamaan dan moralitas publik. Tanpa pendekatan berbasis nilai ini, kebijakan pendidikan akan kehilangan ruh spiritualnya.

Dalam konteks penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah Islam, penting untuk meninjau teori integrasi ilmu dan agama yang menjadi fondasi pendidikan Islam kontemporer. Menurut Al-Attas (1980), pendidikan Islam sejati bertujuan untuk menanamkan adab, yaitu pengenalan dan pengakuan terhadap tempat yang tepat bagi segala sesuatu dalam tatanan penciptaan. Dengan demikian, integrasi Kurikulum Merdeka tidak boleh berhenti pada aspek metodologis atau administratif, melainkan harus menyentuh dimensi epistemologis pendidikan Islam itu sendiri. Artinya, seluruh aktivitas pembelajaran, termasuk proyek-proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila, harus diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran spiritual dan moral peserta didik sebagai khalifah di muka bumi.

Selain itu, kajian pustaka juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan di sekolah Islam sangat dipengaruhi oleh kesiapan paradigma guru sebagai agen perubahan. Guru berperan strategis dalam menjembatani antara prinsip fleksibilitas Kurikulum Merdeka dan orientasi nilai-nilai Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Nurdin (2023), keberhasilan integrasi kurikulum nasional dan keislaman bergantung pada kemampuan guru memahami filosofi pendidikan Islam secara mendalam, bukan sekadar menggabungkan materi umum dan agama secara formalistik. Oleh karena itu, upaya penguatan kompetensi pedagogik dan spiritual guru menjadi faktor kunci agar Kurikulum Merdeka dapat berjalan selaras dengan visi pendidikan Islam yang holistik dan berkarakter.

Sekolah Islam berupaya mengintegrasikan prinsip Kurikulum Merdeka dengan visi keislaman. Banyak madrasah dan sekolah berbasis Islam mulai menerapkan project-based learning yang mengangkat tema keagamaan seperti “Islam dan Kearifan Lokal” atau “Kepemimpinan Rasulullah dalam Kehidupan Modern.” Namun, masih terdapat

kesenjangan dalam pemahaman guru mengenai konsep merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila.

Tantangan utama meliputi kesiapan sumber daya guru, integrasi nilai keislaman, dan keterbatasan pelatihan. Sebagaimana dijelaskan oleh Wajdi (2020), transformasi kebijakan pendidikan Islam harus diarahkan untuk menciptakan tata kelola pembelajaran yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi tanpa kehilangan arah spiritualitasnya.

Strategi penguatan implementasi antara lain: (1) pelatihan berkelanjutan bagi guru, (2) kolaborasi lintas lembaga, (3) penguatan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin, dan (4) pendekatan manajemen berbasis nilai sebagaimana digagas Wajdi (2021).

Selain itu, penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah Islam juga menuntut adanya rekonstruksi paradigma pembelajaran. Guru tidak lagi sekadar berperan sebagai penyampai materi, tetapi sebagai fasilitator yang menumbuhkan potensi spiritual, intelektual, dan sosial peserta didik. Dalam konteks ini, prinsip merdeka belajar perlu dipahami secara integral dengan nilai-nilai tarbiyah Islamiyah, yang menekankan keseimbangan antara akal, hati, dan amal. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya diarahkan untuk mencapai capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kesadaran religius.

Di sisi lain, dukungan kebijakan dari pemerintah dan yayasan pendidikan Islam menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Ketersediaan perangkat ajar berbasis nilai Islam, panduan pelaksanaan proyek keagamaan, serta pelatihan guru yang berbasis konteks lokal perlu diperkuat. Kolaborasi antara Kementerian Agama dan Kemendikbudristek dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan keselarasan antara kebijakan nasional dan kebutuhan pendidikan Islam di lapangan.

Hasil kajian literatur juga menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah Islam sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi dan kepemimpinan kepala sekolah. Sekolah dengan budaya partisipatif dan kepemimpinan visioner cenderung lebih adaptif dalam mengimplementasikan inovasi kurikulum. Oleh karena itu, penguatan kapasitas manajerial dan spiritual kepala sekolah menjadi bagian penting dari strategi implementasi kebijakan ini.

Secara konseptual, integrasi antara Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin menjadi dasar pembentukan karakter pelajar yang utuh. Nilai-nilai seperti ketakwaan, gotong royong, kemandirian, dan refleksi diri dapat disinergikan dalam pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan ekstrakurikuler. Sinergi ini bukan hanya memperkuat identitas keislaman peserta didik, tetapi juga meneguhkan komitmen kebangsaan dalam bingkai pendidikan Islam yang moderat dan inklusif.

Simpulan

Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah Islam merupakan upaya menyeimbangkan kebijakan nasional dengan nilai-nilai keislaman. Tantangan utama terletak pada kesiapan sumber daya manusia, pemahaman konsep, dan integrasi nilai spiritual. Melalui pelatihan berkelanjutan, dukungan regulatif, dan kolaborasi antarlembaga, kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif dan kontekstual.

Kurikulum Merdeka di lingkungan pendidikan Islam tidak hanya menuntut perubahan teknis, tetapi juga transformasi paradigma menuju pendidikan yang humanistik dan transendental. Keberhasilannya bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang inklusif, berkeadilan, serta berakar pada nilai iman dan akhlak. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka berpotensi menjadi instrumen strategis dalam membentuk generasi Muslim Indonesia yang berilmu, berakarakter, dan tetap berpijak pada spiritualitas Islam.

Ucapan Terimakasih

Para peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen, rekan sejawat maupun promotor atas dukungan dan bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syber Syekh Nurjati (UINSSC) Cirebon atas dukungan akademik, fasilitas penelitian, serta lingkungan ilmiah yang kondusif dalam proses penyusunan artikel ini. Dukungan kelembagaan tersebut menjadi bagian

penting dalam memperkaya kajian dan memperkuat relevansi penelitian terhadap pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Attas, S. M. N. (1980). The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Kemendikbudristek. (2022). Panduan implementasi Kurikulum Merdeka. Kemendikbudristek.
- Nurdin, A. (2023). Merdeka belajar dalam perspektif pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 45–58.
- Tilaar, H. A. R. (2011). Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan publik. Rineka Cipta.
- Wajdi, F. (2020). Transformasi manajemen pendidikan Islam di era digital. *Jurnal Al-Fikr*, 8(2), 115–128.
- Wajdi, F. (2021). Analisis kebijakan pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 33–47.
- Wajdi, F. (2022). Value-based policy analysis dalam pendidikan Islam. *Jurnal Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan*, 10(3), 201–210.